



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 3b, Juli 2024

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 3b, Juli 2024

Pages: 779-784

Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang:
Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan

Cahyo Danang Prayugo, Yuli Agung Nugroho, Burhanudin Ahmad, M. Bondhi Alby,
Diaz Kartika Aprillio, Fanny Dian Saputra & Kuswan Hadji

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang,
Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1736>

How to Cite this Article

APA : Danang Prayugo, C., Agung Nugroho, Y., Ahmad, B., Bondhi Alby, M.,
Kartika Aprillio, D., Dian Saputra, F., & Hadji, K. (2024).
Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang: Mendorong
Keterlibatan Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan. *MISTER: Journal
of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational
Research*, 1(3b), 779 – 784.
<https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1736>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang: Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan

Cahyo Danang Prayugo^{1*}, Yuli Agung Nugroho², Burhanudin Ahmad³, M. Bondhi Alby⁴,
Diaz Kartika Aprillio⁵, Fanny Dian Saputra⁶, Kuswan Hadji⁷
Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email corresponding author : ahmad.gans2003@gmail.com

Diterima: 05-06-2024

| Disetujui: 06-06-2024

| Diterbitkan: 07-06-2024

ABSTRACT

Public participation in the process of drafting laws is a key element in maintaining the quality of a country's democracy. In an era of ever-developing social, economic and political dynamics, community participation is becoming increasingly important to ensure that the resulting policies reflect the needs and aspirations of society at large. Nevertheless, challenges in public participation in the legislative process are still things that need to be overcome. In the current digital era, advances in information and communication technology open up new opportunities to increase public participation in drafting laws. However, gaps in access and digital literacy are still obstacles that need to be overcome. Internal factors in the political and legal system can also hinder effective public participation, such as complex bureaucratic structures, lack of transparency in the legislative process, and limited accessibility of information. At the global level, the trend of increasing public participation in policy formation is a major concern, with various initiatives launched to increase public involvement. In Indonesia, public participation in the legislative process is increasingly important along with the development of democracy. This article discusses the importance of public participation in drafting laws, the challenges faced, and strategies to encourage community involvement in policy formation. With collaboration between government, legislative institutions, civil society and the private sector, it is hoped that an environment that supports effective public participation can be created. The goal is to create policies that are inclusive and responsive to the needs of society as a whole.

Keywords: Participation; Public; Society; Policy ; Law

ABSTRAK

Partisipasi publik dalam proses penyusunan undang-undang merupakan elemen kunci dalam menjaga kualitas demokrasi suatu negara. Dalam era dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang, partisipasi masyarakat menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Meskipun demikian, tantangan-tantangan dalam partisipasi publik dalam proses legislatif masih menjadi hal yang perlu diatasi. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang. Namun, kesenjangan akses dan literasi digital masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Faktor internal dalam sistem politik dan hukum juga dapat menghambat partisipasi publik yang efektif, seperti struktur birokrasi yang kompleks, kurangnya transparansi dalam proses legislasi, dan keterbatasan aksesibilitas informasi. Di tingkat global, tren peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan menjadi perhatian utama, dengan berbagai inisiatif diluncurkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Di Indonesia, partisipasi publik dalam proses legislatif semakin penting seiring dengan perkembangan demokrasi. Artikel ini membahas pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang, tantangan yang dihadapi, dan strategi untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan sektor swasta, diharapkan lingkungan yang mendukung partisipasi publik yang efektif dapat diciptakan. Tujuannya adalah menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Katakunci: Partisipasi; Publik; Masyarakat; Kebijakan ; Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Partisipasi publik dalam proses penyusunan undang-undang merupakan elemen kunci dalam menjaga kualitas demokrasi sebuah negara. Di tengah dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, partisipasi masyarakat menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Meskipun demikian, partisipasi publik dalam proses legislatif masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi. Pada era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang. Berbagai platform daring dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan debat mengenai kebijakan publik. Namun, meskipun terdapat kemudahan akses informasi, masih terdapat kesenjangan akses dan literasi digital yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dari berbagai lapisan.

Selain itu, terdapat juga faktor-faktor internal dalam sistem politik dan hukum yang dapat menghambat partisipasi publik yang efektif. Struktur birokrasi yang kompleks, kurangnya transparansi dalam proses legislasi, serta keterbatasan aksesibilitas informasi mengenai pembentukan undang-undang seringkali menjadi halangan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif. Dalam konteks global, tren peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan telah menjadi perhatian utama bagi banyak negara. Berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, termasuk penyelenggaraan konsultasi publik, forum dialog, dan penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi. Namun demikian, tantangan-tantangan dalam menggalang partisipasi publik yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi fokus perhatian para pembuat kebijakan.

Di Indonesia sendiri, partisipasi publik dalam proses legislatif menjadi semakin penting seiring dengan dinamika demokrasi yang berkembang. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi publik yang efektif dalam penyusunan undang-undang. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang, serta strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yuridis normatif digunakan dalam penulisan ini. Pendekatan penelitian yuridis normatif merupakan kajian yang berupaya menyelaraskan ketentuan hukum yang berlaku dengan aturan yang berlaku dalam hal perlindungan hukum dengan norma atau peraturan hukum lainnya dengan hubungannya dengan penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik dalam bidang ini. Parameter penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran spesifik berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Metode ini menitikberatkan pada pemecahan masalah-masalah aktual. Data yang terkumpul disusun terlebih dahulu, kemudian ditafsirkan dan dianalisis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan dari buku-buku atau literatur, undang-undang, konvensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum pada hakikatnya bersifat kualitatif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk

memperjelas pertanyaan yang akan dibahas. Seluruh data yang terkumpul akan diedit dan diolah secara sistematis serta diorganisasikan untuk disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian disimpulkan. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian hukum menggunakan pemikiran deduktif, pemikiran khusus yang memungkinkan penarikan kesimpulan dari keseluruhan kasus yang umumnya faktual, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk partisipasi publik yang dapat diterapkan dalam proses penyusunan undang-undang

Dalam proses penyusunan undang-undang, terdapat beberapa bentuk partisipasi publik yang dapat diterapkan untuk melibatkan masyarakat secara luas. Beberapa bentuk partisipasi publik tersebut antara lain:

1. **Konsultasi Publik:** Memberikan kesempatan kepada masyarakat umum, organisasi, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan masukan dan pendapat terkait rancangan undang-undang yang sedang disusun.
2. **Hearing Publik:** Mengadakan pertemuan terbuka di mana masyarakat dapat menyampaikan pandangan, masukan, atau keberatan terhadap rancangan undang-undang kepada para pembuat kebijakan.
3. **Pengumpulan Masukan Secara Online:** Memanfaatkan platform digital untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat luas melalui survei online, forum diskusi, atau media sosial.
4. **Forum Diskusi Publik:** Mengadakan forum diskusi terbuka yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk mendiskusikan isu-isu terkait rancangan undang-undang.
5. **Partisipasi dalam Tim Kerja:** Melibatkan perwakilan masyarakat atau ahli dalam tim kerja yang bertugas menyusun rancangan undang-undang untuk memberikan sudut pandang yang beragam.
6. **Akses Informasi Publik:** Memastikan informasi terkait proses penyusunan undang-undang dapat diakses secara transparan oleh masyarakat agar mereka dapat memahami dan memberikan masukan yang relevan.

Dengan menerapkan berbagai bentuk partisipasi publik ini, diharapkan proses penyusunan undang-undang dapat lebih inklusif dan representatif, serta menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Manfaat dan Tantangan yang Terkait dengan Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang

Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang memiliki manfaat yang signifikan, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Berikut adalah pembahasan mengenai manfaat dan tantangan terkait dengan peningkatan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang:

Manfaat Peningkatan Partisipasi Publik:

1. **Legitimasi Kebijakan:** Partisipasi publik dapat meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan karena kebijakan tersebut mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengambilan keputusan dapat ditingkatkan.

3. Kualitas Kebijakan: Partisipasi publik memungkinkan adanya beragam sudut pandang dan masukan yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.
 4. Penguatan Demokrasi: Melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang merupakan implementasi nyata dari prinsip demokrasi yang memberikan hak partisipasi kepada warga negara.
 5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Proses partisipasi publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu kebijakan dan hak-hak partisipasi yang dimilikinya.
- Tantangan Peningkatan Partisipasi Publik:
1. Keterbatasan Akses dan Informasi: Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi dan proses pembentukan undang-undang, sehingga dapat menghambat partisipasi publik yang inklusif.
 2. Keterbatasan Sumber Daya: Partisipasi publik memerlukan alokasi sumber daya yang cukup baik dari segi waktu, tenaga, dan anggaran, yang mungkin menjadi tantangan bagi pemerintah atau lembaga terkait.
 3. Tingkat Partisipasi yang Rendah: Beberapa masyarakat mungkin kurang tertarik atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang, yang dapat mengurangi representasi suara masyarakat secara keseluruhan.
 4. Pengaruh Kelompok Kepentingan: Adanya kelompok kepentingan tertentu yang memiliki akses dan pengaruh yang lebih besar dalam proses partisipasi publik dapat menggeser kepentingan masyarakat umum.
 5. Kesulitan Mengelola Masukan: Memproses beragam masukan dan pendapat dari masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang dapat menjadi tantangan dalam menghasilkan kebijakan yang seimbang dan efektif.

Dengan memahami manfaat dan tantangan yang terkait dengan peningkatan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang, diharapkan pemerintah dan lembaga terkait dapat mengimplementasikan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

Dampak partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik

Partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang memiliki dampak yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. Berikut adalah pembahasan mengenai dampak partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik

Transparansi: Meningkatkan Akses Informasi: Partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan transparan mengenai proses penyusunan undang-undang, sehingga meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Mendorong Keterbukaan: Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, transparansi kebijakan publik dapat ditingkatkan karena keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara lebih terbuka kepada masyarakat. Mengurangi Potensi Korupsi: Partisipasi publik dapat menjadi mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kebijakan publik dengan mengidentifikasi potensi korupsi atau praktik tidak etis dalam proses penyusunan undang-undang

Akuntabilitas: Membangun Kepercayaan Masyarakat: Dengan melibatkan masyarakat dalam

proses pembentukan undang-undang, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga terkait dapat ditingkatkan karena kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menyediakan Mekanisme Pertanggungjawaban: Partisipasi publik menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih kuat bagi pembuat kebijakan karena keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang terlibat. Mengurangi Risiko Kesalahan: Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang, risiko kesalahan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat diminimalkan karena adanya pengawasan dan masukan dari berbagai pihak.

Dengan demikian, partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang tidak hanya meningkatkan transparansi kebijakan publik dengan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam pengambilan keputusan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Ini semua berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi dan tata kelola yang baik dalam suatu negara.

KESIMPULAN

Dalam proses penyusunan undang-undang, partisipasi publik memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kebijakan publik. Melalui berbagai bentuk partisipasi publik seperti konsultasi publik, hearing publik, pengumpulan masukan online, forum diskusi, partisipasi dalam tim kerja, dan akses informasi publik, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang. Manfaat dari peningkatan partisipasi publik mencakup legitimasi kebijakan yang lebih kuat, transparansi yang lebih baik, kualitas kebijakan yang lebih berkualitas, penguatan demokrasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses dan informasi, keterbatasan sumber daya, tingkat partisipasi yang rendah, pengaruh kelompok kepentingan, dan kesulitan mengelola masukan juga perlu diatasi. Dampak partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik sangat signifikan. Meningkatkan akses informasi, mendorong keterbukaan, mengurangi potensi korupsi, membangun kepercayaan masyarakat, menyediakan mekanisme pertanggungjawaban, dan mengurangi risiko kesalahan adalah beberapa dampak positif yang dapat dicapai melalui partisipasi publik. Dengan demikian, partisipasi publik bukan hanya sekadar proses partisipatif, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas kebijakan, dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui upaya bersama untuk meningkatkan partisipasi publik, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 59-72.
- Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., & Riswari, R. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Idea Hukum*, 3(1), 493-506.
- Rahma, I. (2019). Partisipasi publik dan keterbukaan informasi dalam penyusunan kebijakan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 80-95.

- Saiya, A. J., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(6), 618-626.
- Tuhumena, C. J. R., Pietersz, J. J., & Sedubun, V. J. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(3), 248-256.